

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmasasmita, Romli, 1997, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Azhary, Muhammad Tahir, 2012, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Barnett, Randy E., et al, 1977, *Assessing the Criminal Restitution and the Legal Process*, Ballinger Publishing, Cambridge.
- Braithwaite, John, 1989, *Crime, Shame, and Reintegration*, Cambridge University Press, United Kingdom.
- Bemmelen, J. M. Van, 1987, *Hukum Pidana 1: Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung.
- Crimes, United Nations Office on Drugs and, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nations Publication, New York.
- Crimes, United Nation Office on Drugs and 2020, *Handbook on Restorative Justice Programmes Second Edition*, United Nations Office, Vienna.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Dressler, Joshua, 1997, *Encyclopedia of Crime & Justice Second Edition*, Macmillan Reference, USA.
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Farid, Andi Zainal Abidin dan Amir Sjarifudin, 1977, *Tinjauan Perbandingan Tentang Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan di Beberapa Negara*, Fakultas Hukum Universitas Hasannudin, Ujung Pandang.

- Gavrielides, Theo dan Vasso Artinopoulou, 2013, *Reconstructing Restorative Justice Philosophy*, Ashgate Publishing Company, England.
- Goetomo, Goenawan, 1974, *Sejarah Perkembangan Kejaksaan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Harahap, M. Yahya, 2017, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Johnson, Robert, Ann Marie Rocheleau, dan Alison B. Martin, 2017, *Hard Time: A Fresh Look at Understanding and Reforming the Prison Fourth Edition*, John Wiley & Sons Ltd, West Sussex.
- Kadish, Sandford H., 1969, *The Processes of the Criminal Law*, Little Brown, Boston.
- Loewy, Arnold H., 2009, *Criminal Law in A Nutshell: Fifth Edition*, West Academic Publishing, Minnesota.
- Manan, Bagir, 2008, *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Maseini, Yulies Tiena, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mayby, R.I. dan S. Walklate, 1994, *Critical Victimology: International Perspective*, SAGE Publications Ltd, United States.
- Moeljatno, 2008, *Asas Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

- Mulyadi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- Nasional, Badan Pembinaan Hukum, 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.
- Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan, 2020, *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Nasution, Abdul Karim, 1972, *Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, PN Percetakan Negara RI, Jakarta.
- Pangaribuan, Luhut M.P., 2014, *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papasa Sinar Sinati, Jakarta.
- Pillai, V. N., 1978, *An Approach to Crime Correction in Developing Countries, Report for 1978 and Resource Materials Series*, No. 16, UNAFEI, 1978.
- Prakoso, Djoko, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana, dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakkan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta.
- Sianturi, S.R., 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soesilo, R., 1991, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap*, Politeia, Bogor.

Strang, Heather, 2002, *Repair or Revenge, Victims and Restorative Justice*, Clarendon Press, Oxford.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Suriasumantri, Jujur S., 1986, *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik: Sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa Ini*, Gramedia, Jakarta.

Suryana, 2010, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, Jakarta.

Tunick, Mark, 1992, *Punishment Theory and Practice*, University of California Press, Berkeley.

Zaidan, Ali, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zehr, Howard, 2014, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, New York.

Zehr, Howard, 1990, *Changing Lenses A New Focus for Crime and Justice*, Herald Press, Scottdale.

B. Tugas Akhir

Pratiwi, Ardining Tyas, 2014, Peran Penyidik dalam Penerapan Konsep Keadilan Restoratif pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Yogyakarta, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Satria, Hariman, 2016, Penggunaan Alasan Sosiologis Sebagai Dasar Terbitnya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Kaitannya dengan Pasal 140 Ayat (2) Huruf A KUHP, *Thesis*, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Siregar, Sari Mariska, 2020, Kajian Penerapan Diversi Berbasis Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Umum, *Thesis*,

Program Magister Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,
Jakarta.

Ekberth Vallen Noya, 2017, Putusan Minah dan Rasmina Tersisihnya Nilai Keadilan Dalam Ruang-Ruang Pengadilan, *Thesis*, Program Magister Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 730).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1134).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811).

D. Jurnal dan Makalah

Daniel Ch. M. Tampoli, Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana, *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 2, Februari 2016.

Indonesia, Mahkamah Agung Republik, “Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi”, *Laporan Tahunan 2018*, Februari 2019.

Justice, New Zealand Ministry of, “Restorative Justice Victim Satisfaction Survey”, *Research Report*, September 2016.

Koritansky, Peter, Two Theories of Retributive Punishment: Immanuel Kant and Thomas Aquinas, *History of Philosophy Quarterly*, Vol. 22 No. 4, 2005.

Rumokoy, Nike K., Eksistensi “Afdoening Buiten Process dalam Hukum Acara Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 8, Januari 2017.

Supusesa, Reimon, “Eksistensi Hukum Delik Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Maluku Tengah”, *Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 1, 2012.

E. Internet

Antara, “Jaksa Agung: 222 perkara dihentikan berdasarkan keadilan restoratif”, <https://www.antaranews.com/berita/1968044/jaksa-agung-222-perkara-dihentikan-berdasarkan-keadilan-restoratif>, diakses 27 Maret 2021.

Detik.com, “Kapasitas Hanya 5.500 Orang, Lapas di Banten Dihuni 11.600 Narapidana”, <https://news.detik.com/berita/d-4860275/kapasitas-hanya-5500-orang-lapas-di-banten-dihuni-11600-narapidana>, diakses 19 November 2020.

HarianJogja.com, “Tingkat Rawan Kejahatan di Bantul Peringkat Kedua, Ini Penyebabnya”, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/01/14/511/1060760/tingkat-rawan-kejahatan-di-bantul-peringkat-kedua-ini-penyebabnya>, diakses 19 Februari 2021.

Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum”, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses 19 November 2020.

Kejaksaan Negeri Bantul, “Sejarah Kejaksaan Negeri Bantul”, <https://kejari-bantul.go.id/profil/>, diakses 13 Maret 2021.

Kejaksaan Republik Indonesia, “Sejarah”, https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3, diakses 5 Januari 2021.

Kejaksaan Republik Indonesia, “7 Program Kerja Prioritas Kejaksaan RI Tahun 2021”, https://www.kejaksaan.go.id/agenda_kegiatan.php?id=695 diakses 26 Maret 2021.

Kompas.com, “Ini Alasan Jaksa Agung Deponir Kasus Samad dan Bambang Widjojanto”, <https://nasional.kompas.com/read/2016/03/03/16572951/Ini.Alasan.Jaksa.Agung.Deponir.Kasus.Samad.dan.Bambang.Widjojanto>, diakses 10 Januari 2021.

Liputan6.com, “Tak Mudah Menjadi Mantan Napi”, <https://www.liputan6.com/news/read/127707/tak-mudah-menjadi-mantan-napi>, diakses 19 November 2020.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Ketua MA: Penyelenggaraan Peradilan Tidak Hanya Harus Cepat Tetapi Juga Harus Tepat”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/4122/ketua-ma-penyelenggaraan-peradilan-tidak-hanya-harus-cepat-tetapi-juga-harus-tepat>, diakses 20 November 2020.

Republika.co.id, “Dirjen: Angka Residivis Capai 24 Ribu Orang”, <https://nasional.republika.co.id/berita/q3uahh430/dirjen-angka-residivis-capai-24-ribu-orang>, diakses pada 19 November 2020.

SuaraJogja.com, “Tingkat Kriminalitas Meningkat 30 Persen, Polres Bantul Tingkatkan Patroli”, <https://jogja.suara.com/read/2020/05/06/162500/tingkat-kriminalitas-meningkat-30-persen-polres-bantul-tingkatkan-patroli>, diakses 19 Februari 2021.

Tempo.co, “Dirjen Lapas Kemenkum HAM: Idealnya Indonesia Butuh 1000 Lapas”, <https://nasional.tempo.co/read/876174/dirjen-lapas-kemenkum-ham-idealnya-indonesia-butuh-1-000-lapas>, diakses 19 November 2020.

Tirto.id, “Bebaskan 30 Narapidana, Yasonna Akui Lapas Masih Overkapasitas”, <https://tirto.id/bebaskan-30-ribu-narapidana-yasonna-akui-lapas-masih-overkapasitas-eKbx>, diakses 19 November 2020.